

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSEKUSI PUTUSAN BPSK DALAMPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DILUAR PENGADILAN(Studi Pada Kasus Sengketa Leasing di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Kediri)



Oleh: RICHI RIZKY UTOMO (05400135)

Law

Dibuat: 2011-02-01 , dengan 6 file(s).

Keywords: Sengketa, Konsumen dan Pelaku Usaha, BPSK

ABSTRAKSI

Dalam banyak kasus, sering kita menemui suatu sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap kontrak baku yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik pelanggaran berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang kesemuanya itu mengarah pada kerugian salah satu pihak baik secara materiil maupun in materiil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan tentang : mengapa putusan arbitrase BPSK Kota Kediri dalam kasus antara konsumen (Kayati) dengan pelaku usaha (PT. Adira Dinamika Multi Finance) tidak dapat dieksekusi? dan bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen (Kayati) atas tidak dilaksanakannya Putusan BPSK Kota Kediri oleh pelaku usaha (PT. Adira Dinamika Multi Finance).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dan data sekunder yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitiannya diketahui bahwa faktor penyebab putusan arbitrase terhadap sengketa konsumen dan pelaku usaha antara Kayati Dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. di BPSK Kota Kediri tidak dapat dieksekusi karena pengadilan negeri tempat diajukannya eksekusi menolak karena putusan BPSK bukanlah produk pengadilan. Hal ini bertentangan dengan pasal 54 dan 57 UUPK serta Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Sedangkan upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen (Kayati) atas ditolaknya permohonan eksekusi oleh pengadilan negeri setempat adalah dilakukan dengan pengajuan gugatan baru. Gugatan baru tersebut adalah gugatan sebagaimana disebutkan dalam hukum acara perdata baik gugatan secara melawan hukum atau gugatan karena wanprestasi (tergantung Karyati memilihnya).

ABSTRACTION

In many cases, we often meet a consumer dispute with business caused by violations of the standard contract that does not comply with the agreement, whether such violation or breach of contract action against the law all of which lead to the loss of either party, either materially or in

material .

Based on this background, it can be formulated problems about: why the arbitration decision in the case of BPSK Kediri between consumers (Kayati) with business (PT Adira Dinamika Multi Finance) can not be executed? and how the remedy adopted by consumers (Kayati) BPSK Decision on non-performance by the business Kediri (PT Adira Dinamika Multi Finance). The method used in the study includes juridical sociological approach, while the authors use data sources of primary data and secondary data analysis and then author using qualitative descriptive method, which is a way of research that produces descriptive data analysis. Their work is known that the factors causing the award to the consumer and business disputes between Kayati With PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. in BPSK Kediri can not be executed because the district court rejected the submission of executions since the court decision is not the product BPSK. This is contrary to articles 54 and 57 and Article 42 Kepmenperindag UUPK No. 350/MPP/Kep/12/2001. While legal action taken by the consumer (Kayati) upon rejection of application for execution by the local courts is done by filing a new lawsuit. The new Gugatan is a legal action as mentioned in the law of civil procedure baik gugatan unlawfully breach of contract or tort karena (depending Karyati select it).

Keywords: Disputes, Consumer and Business Actor, BPS